

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan data yang diperoleh dari Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui *website* www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.1.1 Sejarah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 oleh Menteri Dalam Negari H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu H. Oman Roesman oleh Gubernur KDH Tingkat 1 Jawa Barat H. Aang Kunaefi. Pada awal pembentukannya, wilayah

Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana W.H beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Prawinata SH. Bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya di bawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Lhoksumawe, Langsa, Padangidempuan, Prabumulih, Pagar Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melalui pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari perat serta semua pihak maupun berbagai *stakeholder* di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Terntunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindak lanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serat komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelenggaraan

Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 33 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Menurut Moh Nazir (2011: 54) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Moh Nazir (2011: 55), penelitian studi kasus adalah bagian dari penelitian deskriptif. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Definisi variabel menurut Sugiyono (2011: 2) adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan penelitian yang penulis pilih yaitu “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, maka terdapat empat variabel yang tiga merupakan variabel independen dan satu merupakan variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait (Sugiyono, 2011: 4). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel (X_1), Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel (X_3).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel terkait, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 4). Variabel

Dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Ukuran	Skala
Dana Bagi Hasil (DBH) (X ₁)	Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat 9).	Rasio persentase DBH = Dana Bagi Hasil / Pendapatan Daerah X 100% (Reza Marizka, 2013:8)	Persen (%)	Rasio
Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₂)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pembangunan	Rasio persentase DAU = Dana Alokasi Umum / Pendapatan Daerah X 100% (Reza Marizka. 2013:8)	Persen (%)	Rasio

	keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).			
Dana Alokasi Khusus (DAK) (X ₃)	Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).	Rasio persentase DAK = Dana Alokasi Khusus / Pendapatan Daerah X 100% (Reza Marizka, 2013:9)	Persen (%)	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja Keuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan	Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah / (Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi + Pinjaman) X 100% (Halim, 2012)	Persen (%)	Rasio

	untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2012:232).			
--	--	--	--	--

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (Danang Sunyoto, 2016:20).

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari bagian subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:61). Pada penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran penelitian yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan ruang lingkup penelitian mengenai Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan sampel penelitian berupa data selama 13 (tiga belas) tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019.

3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, adapun prosedur pengumpulan data dan informasi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Dokumentasi

Penelitian dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip berupa informasi yang dapat diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

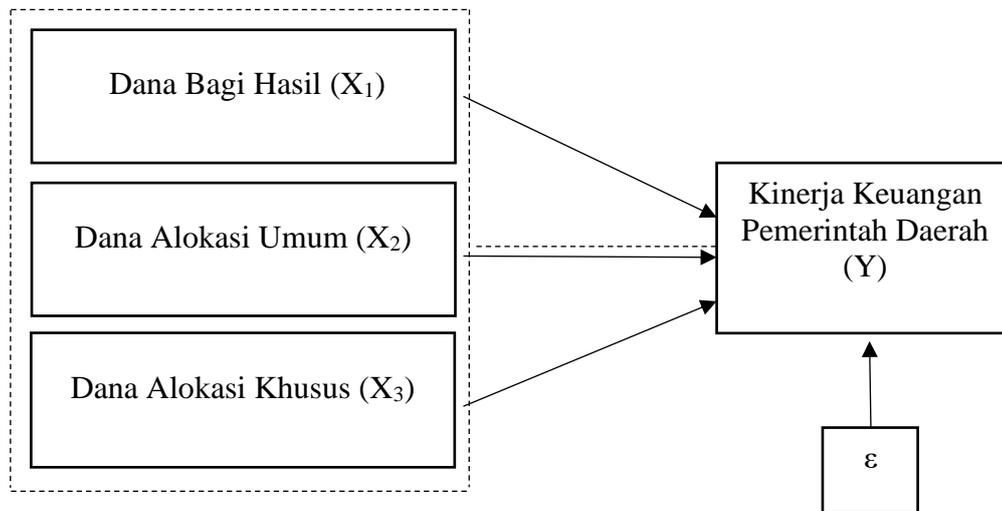
2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menghimpun data dari literatur-literatur yang tersedia baik melalui buku, jurnal ilmiah maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan (Sugiyono, 2016).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah paradigma dengan empat variabel yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) (X_1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X_3) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Paradigma Penelitian

Keterangan:

—▶ = Secara parsial

----- = Secara bersama-sama

ε = Faktor lain yang tidak diteliti penulis

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Ghozali (2018, 161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data

berdistribusi normal atau tidak dengan cara melihat basis Asymo. Sig (2-tailed).

Hasil penelitian dikatakan berdistribusi normal atau memenuhi uji normalitas apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) variabel residual berada di atas 0,05 atau 5%. Sebaliknya apabila berada di bawah 0,05 atau 5% data tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi uji normalitas. Analisis grafik dilihat dari jika ada data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam suatu model regresi linier yang ada. Dengan menggunakan program SPSS, uji autokorelasi dapat digunakan dengan *Runs Test*. *Runs Test* sebagai bagian dari statistik dari statistik non-parametik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terhadap korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Untuk melihat apakah terjadi korelasi atau tidak dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed):

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka dapat diartikan bahwa data yang diperlukan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa data yang diperlukan tidak random sehingga terhadap masalah autokorelasi pada data yang diuji.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Mutikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, maka dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor (VIF)* (Ghozali, 2018: 107).

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ dan sama dengan nilai $VIF > 10$.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan yang lain

(Ghozali, 2018: 137). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisis yaitu sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk meramal bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2017:275). Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan satu variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga menggunakan persamaan regresi linier berganda. Dengan demikian, regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut (Sugiyono, 2017: 275):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Dana Bagi Hasil (DBH)

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

X₃ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

e = Standar error

3. Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghazali (2016:95) koefisien determinasi (R²) pada intinya dapat mengukur seberapa jauh kemampuan mengenai model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Rumus koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. R² = 1, artinya terdapat kecocokan sempurna dan seluruh variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.
- b. R² = 0, artinya tidak ada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dan tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya.

4. Uji Hipotesis

- a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali (2016:97) menyatakan bahwa uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

Adapun pengujian hipotesis penelitian secara parsial yang akan penulis lakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| $H_{01} > 0,05$ | Dana Bagi Hasil secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah |
| $H_{a1} < 0,05$ | Dana Bagi Hasil secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah |
| $H_{02} > 0,05$ | Dana Alokasi Umum secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah |
| $H_{a2} < 0,05$ | Dana Alokasi Umum secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah |
| $H_{03} > 0,05$ | Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah |
| $H_{a3} < 0,05$ | Dana Alokasi Khusus secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah |

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:96) menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas < nilai signifikan ($Sig \geq 0,05$), maka model penelitian tidak dapat digunakan.
- 2) Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas > nilai signifikan ($Sig \leq 0,05$), maka model penelitian dapat digunakan.

Adapun pengujian hipotesis penelitian secara simultan yang akan penulis lakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|--|
| $H_{04} \geq 0,05$ | Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah |
| $H_{a4} \leq 0,05$ | Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah |

5. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan mengenai hipotesis yang akan ditetapkan apakah diterima atau ditolak.